

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
(SIPD)  
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU  
UTARA**

M. Rivai Faruk  
NPP. 30.1417

*Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara*

*Program Studi Keuangan Publik*

*Email: rivaifaruk@gmail.com*

*Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, SE, M.Si*

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Innovation in managing regional finances needs to be increased because we have entered the era of digitalization which must utilize information systems to support the implementation of regional financial management. Information systems are very important in improving regional financial management because it makes it very easy for us to input data that can be monitored directly by the central government. **Purpose:** This study aims to find out how the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in managing regional finances in the city of Tidore Islands is the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems which requires all local governments to use SIPD in carrying out the management process. regional finance This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Tidore Islands. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and documentation, with sample informants determined using a purposive sampling technique. **Result:** The results of the study show that the City of Tidore Islands has succeeded in carrying out instructions from the Ministry of Home Affairs related to the implementation of the Regional Government Information System, although there are still some obstacles and obstacles encountered but they have been overcome properly so that the implementation of the Regional Government Information System can run well. **Conclusion:** The implementation of local government information systems in managing regional finances at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Tidore Islands has been carried out quite well. Some of the obstacles faced by the Tidore Islands BPKAD in implementing SIPD in the regional financial management process include incomplete SIPD features, frequent application errors and limited human resources capable of operating SIPD. Efforts made by the Tidore Islands City BPKAD to overcome obstacles in implementing SIPD in the regional financial management process, namely, developing and perfecting the SIPD application, using assistance applications in anticipation of frequent SIPD errors and holding technical guidance and training specifically for BPKAD staff regarding the operation of SIPD.

**Keywords:** *Regional Government Information System, financial management*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Inovatif dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah perlu di tingkatkan karena kita telah memasuki era digitalisasi yang harus memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan sangat memudahkan kita untuk menginput data yang dapat di pantau langsung oleh pemerintahan pusat.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di kota tidore kepulauan yang merupakan implementasi dari peraturan Menteri dalam negeri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan seluruh pemerintahan daerah menggunakan SIPD dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

**Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan instruksi dari kementerian dalam negeri terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik.

**Kesimpulan:** Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah terlaksana dengan cukup baik. Beberapa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Tidore Kepulauan dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah antara lain, fitur dalam SIPD yang belum lengkap, aplikasi yang sering error dan terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan SIPD. Upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tidore Kepulauan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah yaitu, melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPD, menggunakan aplikasi bantuan sebagai antisipasi SIPD yang sering eror dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan secara khusus bagi staf BPKAD terkait pengoperasian SIPD.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Keuangan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur wilayah masing-masing.

Di Indonesia sendiri pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini pemerintah menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang teknologi. Tantangan tersebut yaitu di bidang keuangan, SDM dan teknologi. Salah satu cara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah pemerintah mengembangkan teknologi yang berbasis sistem informasi.

Pentingnya Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD yaitu untuk karena berperan sebagai alat yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, sistem informasi keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data keuangan dengan lebih baik, sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anggaran dan keuangan.

Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Bekti, 2015).

Saat menerapkan atau mengimplementasikan SIPD, pemerintah daerah diharapkan segera mengintegrasikan seluruh sistem data pembangunan daerahnya dengan data keuangan daerah pada SIPD. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mempermudah terwujudnya data dan sistem informasi keuangan, informasi pembangunan dan informasi pemerintahan lainnya untuk pengambilan keputusan baik di tingkat daerah maupun pusat.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan atau jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif. Dengan adanya SIPD jika dilakukan dengan tepat, banyak keuntungan yang bisa didapatkan bila informasinya dapat diakses dengan lengkap, seperti mengerjakan

perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan untuk memperoleh informasi sehingga tidak perlu lagi proses yang lama. Berikutnya melalui aksesibilitas data dan informasi yang lebih mutakhir dan tepat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Kendala pada penerapan SIPD ini belum terlaksana dengan baik sehingga peneliti mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Terbatasnya sarana prasarana yang mendukung baik dari fasilitas informasi maupun jaringan server yang tidak mendukung dalam melakukan pelayanan.
2. Proses penginputan data yang sering mengalami keterlambatan dikarenakan sering terjadi kendala jaringan.
3. Penginputan juga kurang efektif dan efisien sebab masih dilakukan dengan cara manual.
4. Belum terlaksana tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti juga mengkaji dengan topik yang sama, penulis juga mengkaji dari beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, dan Neni Kumayas pada tahun 2020 mengangkat judul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ialah Penerapan SIPD di BAPPELITBANG Kota Manado sudah berjalan dengan cukup baik di beberapa SKPD, hal ini didasarkan dengan sudah tercapainya empat focus utama yaitu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani pada tahun 2021 mengangkat judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian ialah BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan berbagai kegiatan, namun masih diperlukan kegiatan bimbingan teknis bagi SKPD yang menggunakan SIPD.

Annisa pada tahun 2021 mengangkat judul Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni standard dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian ialah Penerapan aplikasi SIPD pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dilakukan jadwal proses

perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam SIPD, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan awal dari rencana kerja satuan. Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui SIPD namun masih terdapat Kendala yang sering dihadapi yaitu pengguna kurang teliti dalam penginputan data, laptop/ PC yang tiba-tiba eror, dan jaringan internet yang lambat atau tidak stabil.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis berfokus pada implementasi SIPD terkhususnya pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Laudon dan Laudon (2007) yang memiliki 4 dimensi yaitu dimensi organisasi, manajemen, teknologi dan keahlian.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penginputan data maupun informasi pada pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota Tidore Kepulauan..

### **II. METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Maka diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran objektif terkait implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagai entitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lokasi fokus penelitian, serta sebagai lokasi untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dan mengklasifikasikan data, selanjutnya diteliti secara kualitatif untuk dapat memperoleh pemecahan masalah dari data yang kemudian membuat kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk menanggapi permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditulis oleh penulis di bab I yakni bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara pada pengelolaan keuangan daerah, dan apa sajakah yang menjadi permasalahan dalam implementasi SIPD di pemerintah Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara pada pengelolaan keuangan daerah. Serta bagaimanakah solusi pemerintah

Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara dalam menangani kendala yang terjadi di dalam implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dalam penginputan data maupun informasi pada pengelolaan keuangan daerah, Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, maka dari itu penulis menggunakan teori sistem informasi manajemen menurut Laudon dan Laudon (2007:17-18) dalam teori ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Teknologi
4. Keahlian.

### **3.1. Analisis Fokus Penelitian Berdasarkan Perspektif Teoritis**

#### **3.1.1. Organisasi**

Organisasi berperan penting dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan organisasi perangkat daerah untuk melakukan koordinasi ataupun kerja sama yang baik. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### **A. Kebijakan Implementasi SIPD Pada Pengelolaan Keuangan Daerah**

Tujuan dari kebijakan tersebut gunanya untuk mencapai target apabila organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, Amir Gorotomole, S.IP pada tanggal 17 Januari 2023 mengatakan Hal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan yaitu dengan tetap menggunakan E-KEUDA sebagai aplikasi pembantu untuk permintaan tujuannya mengurangi kendala yang ada pada aplikasi SIPD

Kepala Bidang Perbendaharaan bapak Samsul Bahri Ache, SE mengatakan bahwa “Adanya teknologi informasi seperti SIPD ini dapat menyelesaikan dengan segala pekerjaan dengan waktu yang singkat dan akurat, BPKAD juga telah menyampaikan manfaat dari penggunaan SIPD gini kepada perangkat daerah”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses penyampaian informasi tentang penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung proses penginputan data terkait dengan pengelolaan keuangan di Kota Tidore Kepulauan sudah baik. BPKAD Kota Tidore Kepulauan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan informasi terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan.

## **B. Budaya Organisasi Pada Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari adanya zaman modern ini. Setiap manusia maupun suatu organisasi dipaksa bergerak maju ke arah digitalisasi. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh pernyataan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, Yudi Pratama Jasin, S.STP, M.Ec.Dev dalam kegiatan penginputan data pengelolaan keuangan di BPKAD Kota Tidore Kepulauan sering mengalami keterlambatan dikarenakan masih menggunakan cara manual dalam, akan tetapi setelah adanya kebijakan tentang penggunaan SIPD memudahkan serta mempercepat pekerjaan, BPKAD baru menerapkan untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini pada tahun 2020 karena membutuhkan penyesuaian dengan segala alur proses penginputan data pengelolaan keuangan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

### **3.1.2. Manajemen**

Berdasarkan indikator manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Gunanya untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen organisasi diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan APBD.

Dimensi manajemen mempunyai indikator yaitu ketersediaan informasi informasi pada SIPD dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan APBD. Informasi yang dimaksud adalah hasil pengolahan data terkait pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan di daerah. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pimpinan atau pelaksana. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat organisasi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural.

Pengolahan data dan informasi yang seringkali tidak sinkron dengan organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Melalui kehadiran SIPD tersebut, maka permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sehingga melalui kehadiran SIPD tentunya mempermudah proses penyediaan data menjadi informasi melibatkan sejumlah sumber daya, mulai dari manusia, perangkat keras (hardware), hingga perangkat lunak (software). Informasi dalam SIPD digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang terdapat dalam sistem digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintahan

daerah. Oleh karena itu, informasi yang dimasukkan harus akurat, relevan, transparan, dan akuntabel.

Menurut Amir Gorotomole, S.IP selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggunakan dua aplikasi dalam proses pengelolaan keuangannya. Pertama adalah aplikasi SIPD yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, yang diperoleh secara gratis dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan kedua adalah aplikasi E-KEUDA yang digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, manajemen dalam penerapan Sistem Informasi untuk pengambilan keputusan terkhususnya dalam penyusunan APBD di Kota Tidore Kepulauan sudah cukup baik, hal ini karena pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut dalam manajemennya memutuskan untuk menggunakan aplikasi pembantu, yaitu E-KEUDA dalam pelaporannya sehingga dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### **3.1.3. Teknologi**

Berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

SIPD memiliki kemampuan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berkepentingan terhadap data yang tersedia. Sistem ini dilengkapi dengan perlindungan melalui penggunaan id dan password yang diberikan kepada setiap user yang memiliki kewenangan terhadap data terkait perencanaan anggaran, sesuai dengan bidang masing-masing. id dan password tersebut diberikan untuk menjaga keamanan data dari pihak yang tidak berkepentingan dan untuk menghindari adanya perubahan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sistem ini berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat dapat menyajikan data dan informasi tanpa memakan waktu yang lama dan menghubungkan atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Selain itu, fasilitas fisik seperti infrastruktur dan peralatan juga merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

#### **A. Jaringan Untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengoperasian SIPD



sering mengalami gangguan seperti server yang kapasitasnya belum memadai dan jaringan yang sering mengalami error dan sulit diakses sehingga operator SIPD biasanya melakukan penginputan data pada waktu yang tepat.

## B. Sarana dan Prasarana Untuk *Input, Process, dan Output* Informasi

Meskipun SIPD bertujuan untuk mempermudah, namun masih memerlukan perangkat keras untuk mencetak dokumen-dokumen. Namun, pencetakan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan jika pengguna tidak berada di kantor dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang saling terhubung. Pengguna hanya perlu membuka sistem, meng-copy data ke flashdisk, dan mencetaknya. Ini sangat membantu bagi pegawai dan pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas. Untuk mendukung SIPD sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan input, process dan output. Sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

### Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam mengelola SIPD

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4
1.	PC (Laptop)	Baik	1
2.	Monitor	Baik	2
3.	CPU	Baik	2
4.	Router	Baik	1
5.	Wifi	Baik	1
6.	Printer	Baik	3

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2023

### 3.1.4 Keahlian

Penerapan Sistem informasi Pemerintahan daerah sangat dibutuhkan asal gdaya manusia yang handal pada hal ini memiliki keahlian dalam memakai teknologi informasi maupun non teknologi. penguasaan teknologi atau orang yang mempunyai keahlian dalam teknologi informasi sebagai penentu pada penerapan Sistem informasi Pemerintahan daerah (SIPD) secara menyeluruh, hal ini berkaitan erat dengan teknologi yang tidak seluruh orang bisa menguasainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bapak Amir Gorotomole, S.IP selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan menyatakan bahwa “Kami baru memperkenalkan dan mensosialisasikan aplikasi SIPD pada proses penyusunan APBD, yaitu dengan dilakukannya proses pendampingan dan asisten penyusunan”.

Karena teknologi informasi akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman maka dibutuhkan orang-orang yang ahli dibidang sistem informasi yang memahami dan dapat mengoperasikan dengan baik suatu sistem sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah. Hal ini terjadi karena tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan suatu sistem berbasis teknologi komputer dengan maksimal.

Terkait dengan hal ini BPKAD Kota Tidore Kepulauan bahwa setiap SKPD harus memiliki teknologi informasi yang berkualitas agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penyajiannya dalam bentuk laporan yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.



### **3.2. Analisis Fokus Penelitian Riset Terapan Pemerintahan Berdasarkan Perspektif Legalistik**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan peraturan tersebut jika dikaitkan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan amanat yang diatur dalam pasal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dilihat dari BPKAD yang telah mengelolah pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan terciptanya energi serta hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan publik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kaitannya dengan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan, telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi presiden tersebut. Hasil dari implementasi SIPD di Kota Tidore Kepulauan kemudian digunakan untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden maupun amanat yang disampaikan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik. Dalam instruksi ini, memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan percepatan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak adanya keterlambatan penginputan data dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah karena telah adanya aplikasi web terpusat yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berbasis data SIPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### **3.3. Faktor Penghambat**

#### **3.3.1. Fitur Dalam SIPD Yang Belum Lengkap**

Kendala utama berasal dari SIPD sendiri yaitu pemaksaan untuk aplikasi ini segera digunakan pun berakibat terhambatnya pelaksanaan tupoksi OPD dalam hal ini BPKAD Kota Tidore Kepulauan hal ini dikarenakan fitur-fitur yang belum lengkap dan belum disesuaikan dengan tahapan yang ada dan dibutuhkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga masih menggunakan aplikasi pembantu yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu E-KEUDA.

### **3.3.2. Aplikasi Yang Sering Error**

Penggunaan sistem yang dilakukan secara bersamaan oleh seluruh OPD di Indonesia mengakibatkan sistem eror dan pada akhirnya menghambat pekerjaan, dan hal ini pun dialami oleh BPKAD Kota Tidore Kepulauan. Kendala ini merupakan salah satu dampak negatif dari aplikasi yang bersifat *online system* sehingga perlu dilakukan pengembangan aplikasi agar mampu digunakan oleh ratusan perangkat atau *device* dalam waktu bersamaan.

### **3.3.3. Terbatasnya SDM Yang Mampu Mengoperasikan SIPD**

Salah satu kendala yang tidak boleh diremehkan ialah terkait keterbatasan SDM dalam mengoperasikan SIPD, karena hal ini berkaitan dengan tupoksi dan pembagian tugas setiap staf agar tidak terjadi *double work* yang bisa berakibat pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal dan mengalami keterlambatan.

## **3.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan**

### **3.4.1. Melakukan Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi SIPD**

Selaku pengguna aplikasi, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai admin utama SIPD agar dapat menyempurnakan aplikasi SIPD sehingga tidak terjadi lagi aplikasi yang eror ketika digunakan oleh banyak perangkat di waktu bersamaan, dan tahapan pengelolaan keuangan terlaksana sebagaimana mestinya dengan kelengkapan dari fitur-fitur yang tersedia dalam SIPD. Hal tersebut diupayakan guna terwujudnya tujuan dihadirkan aplikasi SIPD yakni guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

### **3.4.2. Menggunakan Aplikasi Bantuan Sebagai Antisipasi SIPD Yang Sering Error**

Sebagai pemimpin organisasi tentunya harus cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Kepala BPKAD yang tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar mengizinkan BPKAD menggunakan E-KEUDA sebagai aplikasi pengganti SIPD sementara aplikasi tersebut diperbaiki dan disempurnakan, agar pelaksanaan pengelolaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

### **3.4.3 Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Secara Khusus Bagi Staf BPKAD terkait Pengoperasian SIPD**

Pengembangan SDM juga menjadi salah satu prioritas BPKAD dalam menunjang keberhasilan tujuan dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah. Salah satunya dengan mengupayakan penyelenggaraan bimtek bagi para staf BPKAD agar memahami dan mampu mengoperasikan SIPD sehingga tidak hanya operator saja yang memiliki pemahaman terkait SIPD, tetapi seluruh staf BPKAD Kota Tidore Kepulauan.

## **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan temuan bahwa Implementasi dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah cukup baik sesuai dengan dimensi dari teori system informasi manajemen menurut Laudon dan Laudon namun masih terdapat beberapa kendala antara lain, fitur dalam SIPD yang belum lengkap, aplikasi yang sering error dan terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan SIPD. Serupa dengan temuan penelitian Citta Nadya Celine Wurara Alfon Kimbal Neni Kumayas yang dilakukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Implementasi dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih membutuhkan perbaikan dari masalah- masalah yang sering terjadi. Serupa dengan penelitian oleh Muhammad Irfan Nasution, BPKAD Kota Medan telah menggunakan Regional Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan program dari pemerintah kota Medan. Hal ini serupa dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan bahwasanya dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakannya.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini sesuai dengan dimensi dari teori sistem informasi manajemen menurut Laudon dan Laudon yang penulis jadikan sebagai patokan berhasil atau tidaknya BPKAD dalam mengimplementasikan SIPD pada pengelolaan keuangan, yakni BPKAD Kota Tidore Kepulauan sudah mengimplementasikan SIPD sesuai dengan kebijakan pada Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD. BPKAD Kota Tidore Kepulauan dalam mengoperasikan SIPD sesuai dengan SOP yang ditetapkan, sehingga pada dimensi organisasi sudah terlaksana dengan baik. Selain itu penggunaan SIPD juga mempermudah proses pengelolaan keuangan, hal ini terbukti dari efisiensi waktu dan minimalisir penggunaan anggaran belanja barang yakni kertas saat proses pengelolaan dilaksanakan menggunakan SIPD, sehingga pada dimensi manajemen sudah terlaksana dengan baik. Aplikasi SIPD yang sifatnya terpusat atau terhubung langsung dengan pemerintah pusat pun memudahkan pemerintah daerah dalam pengiriman data atau informasi sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar atau waktu yang lama, sehingga pada dimensi teknologi sudah berjalan dengan baik. Sampai saat ini terdapat 3 staf BPKAD yang sudah mempunyai pemahaman dan mampu mengoperasikan SIPD, bukan hanya itu tetapi juga memiliki pemahaman dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan tupoksi

BPKAD sebagai pengelola keuangan pun dapat dilakukan dengan maksimal sesuai SAP, sehingga pada dimensi ini sudah terlaksana cukup baik.

- 2) Beberapa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Tidore Kepulauan dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah antara lain, fitur dalam SIPD yang belum lengkap, aplikasi yang sering error dan terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan SIPD.
- 3) Upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tidore Kepulauan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah yaitu, melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPD, menggunakan aplikasi bantuan sebagai antisipasi SIPD yang sering eror dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan secara khusus bagi staf BPKAD terkait pengoperasian SIPD.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka peneliti berharap agar pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari faktor lain selain yang dibahas namun mendukung penelitian ini. Selain itu, Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan masukan dan strategi yang tepat sasaran agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota tidore kepulauan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi lokasi penelitian skripsi, Dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi serta keluarga dan seluruh pihak lain yang membantu peneliti baik secara material maupun non material dalam penyelesaian skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Darmawan, Deni dan Fauzi, Kunkun Nur. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indrayani, Etin dan Gatningsih. (2013). *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan*. Bandung: IPDN PRESS.

Muchlis Hamdi, Siti Ismaryati. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Nugroho, R. (2000). *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia.

Siagian, Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suganda, D. (1992). *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*. Bandung : Sinar Baru.

Sugiyono. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, A. (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.

Taufiq, R. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan gDaerah

## **C. SUMBER-SUMBER LAINNYA**

### **a. INTERNET**

Kemendagri.go.id Peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diakses 2021

[https://sipd.go.id/run/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah](https://sipd.go.id/run/Sistem%20Informasi%20Pemerintahan%20Daerah) diakses 2021

### **b. Jurnal**

Wurara, Citta NC, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *JURNAL EKSEKUTIF* 2.5.

Annisa. (2021). "*Penerapan Aplikasi Sipd (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi*", Bukittinggi: Universitas Andalas. Diakses melalui <http://scholar.unand.ac.id/95937/>

Nasution,M.I.(2021).Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Kota Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.